

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan istilah sederhana, namun sulit untuk di realisasikan. Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dan cita cita dari setiap negara. Tingkat kesejahteraan suatu negara merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan pembangunan di daerah tersebut. Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi ketika seluruh kebutuhan manusia terpenuhi. Kesejahteraan masyarakat dapat terepenuhi seperti sandang, pangan dan papan. Hal lain, yang juga masih perlu diperhatikan adalah kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan.

Masyarakat yang sejahtera tentu menjadi salah satu tujuan hidup, namun kesejahteraan tidak dapat di capai begitu saja. Banyak cara dan pengorbanan yang harus dilewati untuk meraih kesejahteraan yang di idamkan oleh masing-masing individu, misalnya dengan pendidikan yang tinggi, individu tersebut akan mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga menghasilkan pendapatan yang cukup untuk menjaga kesehatan individu tersebut.

Kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari peran penduduk atau masyarakat, karena penduduk merupakan titik sentral dalam kesejahteraan masyarakat. Kegiatan Pembangunan tidak semata-mata diartikan sebagai kegiatan yang menekankan pada aspek fisik saja, tetapi pembangunan di suatu daerah harus

bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya, dan pembangunan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperkenalkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat yang dapat menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan.

IPM mempunyai tiga unsur yang sangat penting dalam menentukan tingkat kemampuan suatu provinsi untuk meningkatnya IPM. Ketiga unsur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu sama yang lainnya. Faktor-faktor lain, seperti ketersediaan kesempatan kerja ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi infrastruktur dan kebijakan pemerintah. IPM suatu daerah akan meningkat apabila ketiga unsur tersebut dapat ditingkatkan, nilai IPM yang tinggi menandakan keberhasilan pembangunan ekonomi di daerah tersebut, terdapat suatu korelasi positif antara nilai IPM dengan derajat keberhasilan pembangunan ekonomi.

Tabel 1.1

RATA-RATA PENDIDIKAN

Provinsi	2015	2016	2017
Jawa Barat	7,5	7,7	8,29
Jawa Timur	7,0	7,37	7,87

TABEL 1.2

RATA-RATA PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR 2017

Kab/Kota	Rata-rata Pendidikan	Kab/Kota	Rata-rata Pendidikan
Kab.Bangkalan	5,89	Kab.Pasuruan	7,39
Kab.Banyuwangi	7,43	Kab.Ponorogo	7,58
Kab.Blitar	7,6	Kab.Probolinggo	6,34
Kab.Bojonegoro	7,34	Kab.Sampang	5,38
Kab.Bondowoso	6,14	Kab.Sidoarjo	9,98
Kab.Gresik	9,25	Kab.Situbondo	6,92
Kab.Jember	6,7	Kab.Sumenep	6,15
Kab.Jombang	8,44	Kab.Trenggalek	7,59
Kab.Kediri	8,11	Kab.Tuban	7,13
Kab.Kediri	6,83	Kab.Tulungagung	8,23
Kab.Lamongan	8,1	Kota Batu	8,97
Kab.Lumajang	6,83	Kota Blitar	8,97
Kab.Madiun	7,99	Kota Blitar	9,74
Kab.Magetan	8,37	Kota Kediri	10,04
Kab.Malang	7,64	Kota Madiun	10,4
Kab.Mojokerto	8,8	Kota Malang	10,27
Kab.Nganjuk	7,87	Kota Mojokerto	10,16
Kab.Ngawi	7,26	Kota Pasuruan	9,16

Kab.Pacitan	7,5	Kota Probolinggo	8,7
Kab.Pamekasan	7,1	Kota Surabaya	9,85

Sumber: Badan Pusat Statistik(BPS), data diolah

Badan Pusat statistik (BPS) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur berada di peringkat lima belas di seluruh Indonesia. Indeks Pembangunan di Jawa Timur lebih rendah dari Jawa Barat. BPS menyatakan bahwa penyebab IPM Jawa Timur rendah adalah rata-rata lama sekolah masyarakat Jawa Timur. Hasil data BPS lama waktu sekolah masyarakat Jawa Timur adalah 7,39 tahun atau di perkirakan lama sekolah masyarakat Jawa Timur sampai SMP kelas dua. 64% masyarakat provinsi jawa timur sudah berada di dunia kerja. Kabupaten/Kota di Provinsi yang menjadi rendahnya pendidikan adalah di Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang menjadi pendidikan terendah di Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Timur karena kebanyakan masyarakat kab sampang putus sekolah atau berhenti sekolah pada kelas 2 smp dan rata-rata masyarakat di kab sampang sudah bekerja saat mereka berhenti dari pendidikan, itu yang menyebabkan IPM Jawa Timur lebih rendah dari pada IPM di Jawa Barat (<http://jatim.tribunnews.com>)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak terlepas dari tema desentralisasi ekonomi sebagai konsekuensi diadopsinya sistem desentralisasi (otonomi daerah). salah satu aspek yang sangat penting dalam desentralisasi ekonomi adalah desentralisasi fiskal. UU No. 33 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. UU tersebut penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Dana Perimbangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara Belanja Operasi terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu mengevaluasi kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi sebagai bahan referensi bagi penenilti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian kinerja keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat di kab/kota Jawa Timur.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Peneliti, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Rancangan Riset, Batasan Penelitian, Identifikasi Variabel, Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel, Populasi Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan Data Serta Teknik Analisis Data.

BAB IV GAMBARAN DAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan tentanf gambaran subjek, penelitian, analisis data yang digunakan, analisis deskriptif dari masing masing variabel yang digunakan serta pembahasan dari hasil hasil analisis tersebut.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari analisis data, keterbatasan penelitian dan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.

